



BAB I

PENDAHULUAN

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Festival *Kurultáj – A Magyar Törzsi Gyűlésⁱ* (Pertemuan Antarsuku Hongaria) merayakan beragam tradisi dan budaya yang spesifik untuk warisan suku-suku nomaden yang berasal dari Asia Tengah atau bangsa Turki-Hun. Festival tersebut berakar dari pertemuan antarsuku ‘*Kurultáj*’ yang diadakan pada tahun 2008 di Hongaria, menyerupai pertemuan antarsuku tradisional dalam budaya Asia Tengah dengan sebutan yang sama.¹ Sejak 2010, festival *Kurultáj* telah mengundang berbagai delegasi, mewakili *nation-state* lainnya Hongaria, Turki, Bulgaria dan *stateless nation* lainnya Chuvash, Bashkir, Uyghur.

Berawal dari sebuah organisasi independen yang berorientasi pada penelitian dengan fokus pada penelitian ilmiah mengenai bangsa dan budaya Turki, *Magyar Turán Alapítványⁱⁱ* atau Yayasan Turan Hongaria menaungi sejumlah cendekiawan dan ilmuwan yang memiliki gelar dalam bidang sejarah, arkeologi, antropologi, etnografi, linguistik, dan bahkan genetika.²

Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Hongaria, dengan maksud untuk mencapai bagian tertentu dari kepentingan nasional mereka, sehingga mendirikan *Magyar Turán Szövetségⁱⁱⁱ* (Asosiasi Turan Hongaria) dan diformalkan lebih lanjut untuk menyelenggarakan festival.

¹ Kurultáj.hu. (t.thn.). *Mi a Kurultáj?* Kurultáj.

² Bíró, Z. A. (2009). *A magyarok genetikai rokonai – Bíró András Zsolt kutatási eredményei*. Kurultáj.

Sehubungan dengan festival *Kurultáj*, diduga agenda utama mereka berkuat pada penyatuan suku-suku nomaden berdarah Turki-Hun melalui Turanisme. Berperan di sini sebagai ideologi pan-nasionalistis, Turanisme dimaksudkan untuk mendorong kerja sama antara bangsa-bangsa Turan yang tersebar di seluruh Eropa timur hingga Asia. Contoh umum dari kelompok etnis yang terkait dengan bangsa Turan termasuk Hongaria, Turki, Kazakh, dan Mongol.

Festival *Kurultáj* memegang peran penting dalam melestarikan sejumlah besar warisan leluhur yang saat ini disimpan di Museum Sejarah Alam Hongaria. Kerja sama mereka telah terjalin sejak tahun 2009 se usai penelitian di Kazakhstan yang dilakukan oleh András Zsolt Bíró, yang merupakan seorang peneliti di Departemen Antropologi dari museum tersebut.³ Ia kemudian terlibat dalam *Magyar Turán Alapítvány* dan menjabat sebagai presiden dewan pengawas hingga saat ini.⁴ Berkatnya, Turanisme di Hongaria mengalami kebangkitan kembali.

Sebagai ideologi pan-nasionalistis yang didukung dengan referensi sejarah yang ditengarai konkret, Turanisme mulai berkembang menjadi salah satu di antara cara-cara lain untuk menghubungkan kembali dan menemukan kembali nenek moyang yang pernah menyatukan bangsa-bangsa Turan. Bangsa-bangsa yang dulunya terdiri dari beberapa suku Turan sekali lagi berusaha untuk menumbuhkan hubungan yang lebih dekat dan yang terpenting, kerja sama. Turanisme pada masa ini mulai mengemuka dalam wacana publik di Hongaria, yang mana partai *Jobbik*^{iv}, gunakan sebagai sarana untuk menjalankan kampanye politik mereka. Bersamaan

³ Bényei, A. (2022). *Hun lovassal is szembenézhetünk*. Magyar Nemzet.

⁴ Kurultáj.hu. (2020). *Kurultaj - nagyfilm a Magyar Törzsi Gyűlésről Kurultáj*. Kurultáj.

dengan itu, hampir pada waktu yang sama, pemerintah Hongaria yang didominasi oleh *Fidesz*^v dan pemimpinnya, Viktor Orbán, mulai menyuarakan aspirasi mereka untuk meningkatkan hubungan guna menaikkan volume perdagangan dengan bangsa-bangsa ‘Timur.’

Dalam waktu singkat, tahun 2010 menandai dimulainya kebijakan luar negeri Hongaria yang baru diumumkan bernama *Keleti Nyitás*^{vi} atau Terbuka ke Timur.⁵ Menariknya, *Jobbik* yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah dengan *Fidesz* pada saat itu telah memberikan dukungan keuangan secara teratur kepada *Magyar Turán Alapítvány* dalam bentuk donasi.⁶

Hubungan dengan pemerintah ini berkembang semakin erat pada tahun 2016 ketika ratusan delegasi ikut serta dalam pembukaan festival *Nagykurultáj* yang diadakan di Aula Besar Parlemen atas undangan Sándor Lezsák, Wakil Ketua Parlemen Hongaria.⁷ Semakin pesatnya perkembangan yang ditunjukkan pada tahun-tahun berikutnya telah menjadi perhatian bahwa festival *Kurultáj* bersama *Magyar Turán Alapítvány* memiliki nilai sebagai kasus tersendiri yang layak untuk diselidiki.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dengan ekstensif sebelumnya, “bagaimana implementasi diplomasi budaya Hongaria melalui festival *Kurultáj* tahun 2008 hingga 2022?” menjadi rumusan masalah untuk kajian berikut.

⁵ Bernek, Á. (2018). Hazánk keleti nyitás politikája és a 21. századi geopolitikai stratégiák összefüggései. *Külügyi Szemle*, 17(2), 122-144.

⁶ Magyar Idők. (2017). *Hallgat az ősök napjáról a Jobbik*. Magyar Idők.

⁷ Magyar Távirati Iroda. (2016). *A Parlamentben kezdődött meg a Kurultáj*. Híradó.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Dari sudut pandang umum, penelitian berikut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang layak bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ranah sosial-politik. Selain itu, penelitian berikut akan bertindak sebagai langkah besar guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian berikut bertujuan untuk memberikan wawasan akademis lebih lanjut tentang pelaksanaan diplomasi budaya yang spesifik wilayah dan terkait dengan sejarah dan warisan yang unik bagi masyarakat Hongaria. Mengungkap implementasi diplomasi budaya melalui festival, menemukan jejak nilai-nilai Turanisme melalui festival, dan mengklasifikasikan festival ke dalam diplomasi budaya yang diusulkan oleh Zamorano dalam penelitian sebelumnya, adalah tujuan secara khusus.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Aktor Non-negara

Dalam ranah politik internasional, serangkaian peristiwa dimulai dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh apa yang disebut ‘aktor.’ Aktor dalam

konteks berikut merujuk pada entitas, individu maupun institusi yang memiliki kapasitas agensi dalam memberikan pengaruh pada urusan politik. Kapasitas tersebut dapat berupa akses terhadap sumber daya, informasi, dan lainnya yang menentukan latar belakang aktor dan menghasilkan pengaruh mereka.⁸

Aktor dalam politik internasional dapat merujuk pada individu atau entitas institusional yang secara resmi berafiliasi dengan negara tertentu. Aktor demikian diklasifikasikan sebagai *state actors* atau aktor negara. Di luar itu, terdapat jenis aktor lain dalam politik internasional yang tidak secara resmi berafiliasi dengan negara tertentu, dan mengejar tujuan dan kepentingan yang seringkali mewakili banyak aktor secara bersamaan. Aktor demikian diklasifikasikan sebagai *non-state actors* atau aktor non-negara.

Menurut penelitian sebelumnya, aktor non-negara mampu dan bertekad untuk memanfaatkan kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi media di era modern ini, untuk memperkuat jaringan dan pengaruh mereka lintas batas negara dengan mudah.⁹ Sehingga, aktor non-negara memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi secara independen, terlepas dari negara asalnya.

1.4.2 Diplomasi Budaya

Dalam diskusi-diskusi kontemporer, terdapat keterbatasan definisi diplomasi budaya yang dapat diterima secara universal di antara para cendekiawan. Hal

⁸ Huijgh, E. (2016). Public Diplomacy. Dalam P. Kerr, C. M. Constantinou, & P. Sharp (Penyunt.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (hal. 437-450). London: SAGE Publications.

⁹ Grincheva, N. (2015). *Cultural Diplomacy of a Different Kind: A Case Study of the Global Guggenheim*. Doctoral dissertation, Montréal: Concordia University.

ini semakin terhambat oleh fakta di mana diplomasi budaya berdiri, apakah bagian dari diplomasi publik atau lebih diposisikan secara setara berdampingan dengan diplomasi publik itu sendiri.¹⁰ Untuk tujuan penelitian berikut, dua makalah terkemuka yang bertujuan untuk merumuskan ulang kerangka dasar diplomasi budaya muncul. Makalah pertama berusaha memperluas potensi dari konsepsi umum bahwa diplomasi budaya merupakan bagian besar dari diplomasi publik.¹¹ Namun, makalah yang lebih baru didapati lebih sesuai dengan penelitian berikut.

Diplomasi budaya yang didefinisikan dalam artikel kedua, dihasilkan dari penggunaan budaya dalam strategi kebijakan luar negeri suatu negara yang mengarah pada munculnya dua kategori diplomasi budaya yang cukup kontras, yakni *culturalist* dan *neo-propagandist*.¹² Jenis *culturalist* atau refleksif dicirikan oleh kebijakan representasi budaya yang cukup beragam yang berfokus pada pertukaran budaya dan kesepahaman bersama. Sementara itu, jenis *neo-propagandist* mengacu pada penggunaan budaya sebagai subjek ‘instrumentalisasi’ politik dan ekonomi oleh pemerintah dalam memproyeksikan representasi budaya ke luar negeri.¹³

¹⁰ Lähdesmäki, T. (2021). Heritage Diplomacy Discourses in the EU: Notions on Cultural Diplomacy, Cultural Heritage, and Intercultural Dialogue among EU Officials and Heritage Practitioners. *Ethnologia Europaea*, 51(2), 48-71.

¹¹ Kang, H. (2013). Reframing Cultural Diplomacy: International Cultural Politics of Soft Power and the Creative Economy. *Culture, Media & Creative Industries*.

¹² Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.

¹³ Ibid.

Bagi Zamorano, perbedaan dan parameter substansial antara diplomasi budaya *culturalist* dan *neo-propagandist* bertumpu pada hubungan antara pelaksanaan diplomasi budaya dan strategi kebijakan luar negeri negara tersebut. Secara teoretis, sebagai hasil dari penerapan *soft power* dalam kebijakan luar negeri, diplomasi budaya muncul di antara berbagai strategi kebijakan luar negeri yang dapat digunakan oleh negara. Berkat sifatnya yang longgar, budaya dianggap kompatibel dengan berbagai jenis kebijakan luar negeri, mulai dari kebijakan ekonomi hingga militer. Hal ini kemudian menghasilkan sebagai berikut.

Pertama, budaya direduksi menjadi alat politik negara sekaligus komoditas ekonomi, sehingga kehilangan nilai intrinsik dan otonominya karena telah terlepas dari ruang publik. Kedua, sentralisasi proses diplomasi budaya dengan mengorbankan hubungan horizontal dengan dan keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah non-pusat dan lembaga-lembaga kecil yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan pemerintah pusat. Hanya pemerintah pusat dan mitranya pada tingkat yang lebih rendah, baik publik maupun swasta, yang menjadi pengambil keputusan dalam hal nilai-nilai budaya dan seni apa yang akan diproyeksikan dan direpresentasikan melalui diplomasi budaya. Hal ini menyebabkan diplomasi budaya dikategorikan sebagai *neo-propagandist*.

Secara lebih lanjut, terdapat 6 variabel yang dapat digunakan sebagai parameter pembeda antara diplomasi budaya *neo-propagandist* dan kebalikannya yakni *culturalist*. Perbedaan tersebut tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.1 Tipologi Diplomasi Budaya oleh Zamorano

Variabel	Diplomasi Budaya	
	<i>Culturalist</i>	<i>Neo-propagandist</i>
Tujuan	Kesepahaman Bersama	Kekuasaan/Persuasi
Kontrol Pesan	Lemah	Kuat
Partisipasi Sosial	Tinggi	Rendah
Pola Komunikasi	Dua Arah	Satu Arah
Hasil	Relatif	Spesifik
Karakter Audiens	Aktif	Pasif

Sumber: Olahan penulis, diadopsi dari Zamorano (2016, p. 180)

Proses instrumentalisasi politik dan ekonomi dalam diplomasi budaya mempengaruhi variabel-variabel berikut sehingga menyebabkan suatu praktik diplomasi budaya dikategorikan sebagai diplomasi budaya *neo-propagandist*. Sementara itu, kurangnya dampak instrumentalisasi proses diplomasi budaya menyebabkan praktik diplomasi budaya dikategorikan sebagai *culturalist*.

Akibat proses instrumentalisasi tersebut, pada variabel pertama tujuan diplomasi budaya mengarah pada menguasai dan/atau mempersuasi hal tertentu yang akan mengubah posisi internasional negara. Secara spesifik, parameter dari tujuan khusus ini berbentuk peningkatan kekuatan dan citra negara dalam hubungan internasional, baik secara politik maupun ekonomi. Namun, dalam upaya mencapai tujuan yang sama, pendekatan *culturalist* cenderung mengubah posisi internasional negara tersebut melalui hubungan berlandaskan kekerabatan dan saling pengertian dengan negara-negara yang

dituju. Dalam pendekatan ini, seringkali narasi tentang kesamaan sejarah atau budaya antara negara-negara yang terlibat mengemuka dalam wacana publik.¹⁴

Pada variabel kedua yaitu kontrol pesan, proses instrumentalisasi menyebabkan diplomasi budaya menjadi sangat terkontrol oleh pemerintah negara. Kendali ini hadir untuk memastikan hanya narasi budaya versi pemerintah saja yang direpresentasikan oleh diplomasi budaya, sehingga menjadi media yang hanya untuk menggambarkan citra positif budaya dan negara pelaku diplomasi. Sedangkan, pendekatan *culturalist* cenderung melibatkan kontrol pesan yang lemah, bahkan mungkin sukar untuk diusut kembali ke pemerintah. Sehingga, dalam hal ini, aktor non-negara yang diberi mandat dalam mengemban tugas diplomasi budaya dapat lebih leluasa dalam menentukan agenda dan perencanaan kegiatan yang relevan.¹⁵

Pada variabel ketiga yaitu partisipasi sosial, kontrol yang kuat negara terhadap diplomasi budaya menyebabkan berkurangnya partisipasi lembaga-lembaga pemerintah non-pusat dan lembaga minor lainnya. Kurangnya partisipasi ini dapat terukur secara advokasi publik, penyelenggaraan acara, dan pembahasan terkait nilai apa yang akan direpresentasikan oleh diplomasi budaya tersebut. Sementara itu, partisipasi masyarakat, lokal hingga mancanegara, tidak dibatasi untuk kalangan tertentu dalam diplomasi budaya *culturalist*. Kontrol

¹⁴ Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.

¹⁵ Ibid.

pemerintah cukup terbatas sehingga beragam lembaga yang terlibat berujung pada penyelenggaraan acara yang menarik minat dari berbagai kalangan.¹⁶

Variabel keempat, yaitu pola komunikasi, berkaitan dengan variabel kontrol pesan. Kuatnya kontrol pesan menyebabkan negara cenderung menghalangi narasi budaya yang berbeda dengan yang dibawanya, sehingga diplomasi budaya menjadi pola komunikasi satu arah. Parameter variabel ini adalah adanya penolakan masyarakat terhadap citra negara yang direpresentasikan oleh diplomasi budaya tersebut. dalam konteks diplomasi budaya *culturalist*, di mana kontrol pesan dari pemerintah lemah, pola komunikasi antara aktor diplomasi dan audiens justru menjadi saling berpengaruh, sehingga kemungkinan munculnya perspektif baru terhadap agenda dan pelaksanaan diplomasi budaya tersebut akan lebih terbuka.¹⁷

Pada variabel kelima yaitu hasil, kontrol kuat negara terhadap diplomasi budaya menyebabkan diplomasi budaya harus memiliki hasil yang spesifik. Hal ini disebabkan karena negara merupakan aktor politik yang perhitungan dan rasional dalam memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga negara memberikan tujuan khusus yang terukur pada instrumen politik luar negerinya. Parameter variabel ini sama dengan variabel tujuan, yakni peningkatan kekuatan dan citra negara dalam hubungan internasional, baik secara politik maupun ekonomi. Kendati demikian, diplomasi budaya *culturalist* berupaya

¹⁶ Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.

¹⁷ Ibid.

mencapai tujuan yang sama pula, namun cenderung melalui hubungan yang berlandaskan kekerabatan dan saling pengertian dengan negara-negara yang dituju. Sehingga, tujuan yang hendak dicapai dapat terukur, namun tidak secara khusus ditentukan terhadap entitas atau negara tertentu.¹⁸

Pada variabel keenam berupa karakter audiens, karena kecenderungan unilateral tingginya dan kontrol terhadap pesan dan hasil diplomasi budaya, audiens yang memiliki potensi untuk aktif berdialog dengan aktor penyelenggara diplomasi menjadi pasif¹⁹. Audiens hanya menerima pesan-pesan dalam diplomasi dengan sedikit dialog antara audiens dan aktor penyelenggara. Parameter karakter audiens yang pasif ini adalah kurangnya *engagement* antara aktor diplomasi dan audiens. Lain halnya dengan diplomasi budaya *culturalist*, dengan audiens yang memiliki potensi untuk aktif berdialog dengan aktor penyelenggara diplomasi. Tak hanya berinteraksi dengan pesan-pesan dalam diplomasi, *engagement* antara aktor diplomasi dan audiens juga menjadi dua arah dan kolaboratif.²⁰

¹⁸ Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Grincheva, N. (2015). *Cultural Diplomacy of a Different Kind: A Case Study of the Global Guggenheim* (Doctoral dissertation ed.). Montréal: Concordia University.

1.5 Sintesis Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dan diagram di atas, untuk menganalisis festival *Kurultáj*, penelitian dimulai dengan mengenali peran *Magyar Turán Alapítvány* sebagai aktor non-negara. Pada intinya, penyelenggara bertindak sebagai aktor untuk melestarikan dan mempromosikan budaya melalui suatu festival yang melibatkan berbagai bangsa Turan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya diplomasi budaya dalam festival *Kurultáj*. Di luar itu, setelah diselidiki lebih lanjut berdasarkan parameter yang ditentukan oleh Zamorano (2016), festival tersebut

termasuk dalam jenis diplomasi budaya *neo-propagandist* berkat tujuannya untuk memperkuat kekuasaan atau persuasi nasional, pesan-pesan tersembunyi yang ditransmisikan secara sepihak dan lebih terkontrol, audiens yang dimaksudkan untuk terlibat secara pasif dan kurang partisipatif, dan akhirnya, hasil-hasil yang sebagian besar sesuai dengan apa yang dipandang perlu oleh pemerintah.²¹

1.6 Argumen Utama

Sehubungan dengan kerangka pemikiran, penelitian mengenai implementasi diplomasi budaya Hongaria melalui festival *Kurultáj* tahun 2008 hingga 2022 terindikasi berbentuk *neo-propagandist*, dengan argumen sebagai berikut. Penyelenggaraan festival *Kurultáj* memacu kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Turan lainnya, yang mana juga selaras dengan kepentingan pemerintah saat itu, yakni kebijakan *Keleti Nyitás*. Dengan dukungan resmi dari pemerintah Hongaria termasuk anggaran tahunan untuk mereka, *Magyar Turán Alapítvány* dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu aktor non-negara paling signifikan dalam memajukan budaya Hongaria di luar negeri. Keterlibatan pemerintah disertai analisis lanjutan inilah yang menjadikan festival *Kurultáj* termasuk dalam kategori *neo-propagandist* yang diusulkan oleh Zamorano dalam penelitiannya mengenai diplomasi budaya.

²¹ Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe deskriptif menunjukkan penelitian yang berusaha menyajikan deskripsi komprehensif mengenai fenomena sosial tertentu, umumnya secara rinci dan hanya menggunakan satu variabel penelitian.²² Oleh karena itu, penelitian berikut mencari tahu apakah terdapat implementasi diplomasi budaya dalam festival *Kurultáj*. Selama bertahun-tahun, *Magyar Turán Alapítvány* telah mengirimkan undangan, dan festival tersebut juga dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara Turan. Peristiwa demikian menunjukkan bahwa suatu bentuk diplomasi publik, khususnya diplomasi budaya mungkin ada.

Namun, penelitian berikut berusaha untuk menemukan keberadaannya dan tidak mencari temuan apapun yang dihasilkan dari implementasi diplomasi budaya yang mungkin ada ataupun tidak. Oleh karena itu, penelitian berikut deskriptif karena tidak mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel.²³

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian berikut ditujukan untuk mengikuti perkembangan festival *Kurultáj* dari tahun 2008 hingga 2022. Keputusan tersebut diambil karena *Magyarországi Kurultáj*, pendahulu dari festival *Nagykurultáj* dua tahunan tersebut awalnya diadakan pada tahun 2008, sementara tahun 2022 menjadi

²² Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.

²³ Ibid.

festival terkini. Penambahan *Nagykurultáj* pada tahun 2022 diperlukan sebab edisi tahun 2020 mengalami pembatalan berkat pandemi COVID-19.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian berikut menggunakan dua jenis metode pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan selama *Kurultáj* 2022, yang diselenggarakan di pinggiran Bugac, Hongaria pada 12-14 Agustus 2022. Tak hanya itu, penulis juga menghimpun laporan keuangan *Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány* sebagai yayasan utama penyelenggara, sejak pendiriannya pada tahun 2009 hingga laporan terkini pada tahun 2021. Beberapa data primer lain juga dikutip dari instansi terkait seperti Kantor Sekretariat Parlemen Nasional, serta didukung dengan temuan dari beragam data sekunder termasuk makalah dan buku ilmiah, serta artikel dari berita dan media. Data tersebut diperoleh melalui *database* internet (daring) dan berasal dari pihak-pihak yang valid dan bereputasi baik.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian mengenai fenomena sosial. Hal ini membutuhkan serangkaian penelitian yang interaktif untuk memvalidasi temuan.²⁴ Meski data yang terkandung dalam penelitian berikut terdiri dari kualitatif dan kuantitatif, namun data yang

²⁴ Prakash, D., & Klotz, A. (Penyunt.). (2008). *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

disajikan sebagian besar dalam kualitatif dan sisanya dapat ditafsirkan secara kualitatif dalam konteks sosial.

Selain itu, penelitian berikut dimaksudkan untuk memeriksa data berdasarkan seperangkat parameter berdasarkan variabel yang mengandalkan kualitas, bukan kuantitas. Variabel-variabel tersebut meliputi 1) Tujuan, 2) Kontrol pesan, 3) Partisipasi sosial, 4) Pola komunikasi, 5) Hasil, dan terakhir 6) Karakter audiens.²⁵ Dengan demikian, variabel-variabel tersebut diperlukan untuk menganalisis secara kualitatif implementasi diplomasi budaya dalam festival *Kurultáj* selama bertahun-tahun.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I berisi pengantar umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian.

BAB II berisi upaya untuk mengidentifikasi prakondisi yang melatarbelakangi kemunculan diplomasi budaya, dalam festival *Kurultáj* 2008-2022.

BAB III berisi analisis implementasi diplomasi budaya berdasarkan tipologi oleh Zamorano pada tahun 2016, dalam festival *Kurultáj* 2008-2022.

BAB IV berisi kompilasi pernyataan penutup untuk penelitian berikut.

²⁵ Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 166-186.